



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
KOMISI I DPR RI  
KE PROPINSI PAPUA BARAT  
DALAM RESES MASA PERSIDANGAN III  
TAHUN SIDANG 2010 - 2011  
TANGGAL 10 – 12 APRIL 2011**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
2011**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I. UMUM**

Setiap reses masa persidangan, Komisi-komisi DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke daerah-daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat 3 huruf (f) Tata Tertib DPR RI yang menyatakan bahwa “mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses atau apabila dipandang perlu, dalam Masa Sidang dengan persetujuan Pimpinan DPR RI yang hasilnya dilaporkan dalam Rapat Komisi untuk ditentukan tindak lanjutnya”. Berdasarkan hal tersebut, maka pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2010 - 2011, Komisi I DPR RI telah membentuk beberapa tim kunjungan kerja dimana salah satunya adalah tim kunjungan kerja ke Propinsi Papua Barat. Laporan berikut adalah hasil temuan tim kunjungan kerja Komisi I DPR RI di Propinsi Papua Barat.

### **II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kunjungan Kerja dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi dan wewenang DPR RI yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi Papua Barat dilaksanakan dalam rangka mengetahui secara langsung permasalahan-permasalahan di Propinsi Papua Barat yang berkaitan dengan ruang lingkup dan tugas Komisi I DPR RI khususnya permasalahan di bidang pertahanan, intelijen, serta komunikasi dan informasi.

Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai perkembangan situasi dan kondisi mitra kerja Komisi I DPR RI di lapangan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi baik yang menyangkut sarana dan prasarana maupun kualitas sumber daya manusianya. Data dan informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan masukan dan kajian Komisi I DPR RI dalam pembahasan rapat-rapat kerja dengan pemerintah dan instansi terkait sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI dalam masa persidangan berikutnya.

### **III. WAKTU DAN KOMPOSISI TIM KUNJUNGAN KERJA**

Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Papua Barat dilaksanakan sejak tanggal 10 hingga 12 April 2011. Jumlah seluruh tim adalah 23 (dua puluh tiga) orang dengan komposisi keanggotaan tim yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang Anggota Komisi I DPR RI dibantu oleh 2 (dua) orang Sekretariat Komisi I DPR-RI, 1 (satu) orang Tenaga Ahli Komisi I DPR RI, 1 (satu) orang Bagian Pemberitaan Setjen DPR RI dan 5 (lima) orang pendamping/penghubung dari instansi mitra Komisi I DPR RI.

Adapun daftar nama Tim Anggota Komisi I DPR RI yang melakukan Kunjer ke Papua Barat adalah sebagai berikut:

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. H Hayono Isman SIP             | - Ketua Tim (F-PD)     |
| 2. Mayjen TNI (purn) Salim Mengga | - Anggota Tim (F-PD)   |
| 3. KRMT Roy Suryo Notodiprojo     | - Anggota Tim (F-PD)   |
| 4. Paula Sinjal, SH               | - Anggota Tim (F-PD)   |
| 5. Yorrys Raweyai                 | - Anggota Tim (F-PG)   |
| 6. Tantowi Yahya                  | - Anggota Tim (F-PG)   |
| 7. H. Tritamtomo, SH              | - Anggota Tim (F-PDIP) |

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 8. Helmy Fauzy            | - Anggota Tim (F-PDIP) |
| 9. HM Gamari              | - Anggota Tim (F-PKS)  |
| 10. IR Muhammad Najib MSc | - Anggota Tim (F-PAN)  |
| 11. H Achmad Daeng Se're  | - Anggota Tim (F-PPP)  |

**Sekretariat**

- |                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Dwiana Hari Data         | - Sekretariat Komisi I |
| 2. H Achmad Rojali          | - Sekretariat Komisi I |
| 3. Tubagus Erif Faturrahman | - Tenaga Ahli          |

## **BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN**

### **I. PROFIL PROPINSI PAPUA BARAT**

#### **Umum**

Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Papua. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Provinsi Papua Barat dimekarkan dari Provinsi Papua pada 21 November 2001. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus.

Saat ini Papua Barat dipimpin oleh pasangan Abraham Octavianus Atururi (Brigjen Marinir Purn.) sebagai Gubernur dan Drs. Rahimin Katjong, M.Ed. sebagai Wakil Gubernur.

#### **Wilayah Pemerintahan**

Provinsi Papua Barat beribukota di Kabupaten Manokwari. Secara administratif, Provinsi Papua Barat terdiri dari 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kotamadya, yaitu Kabupaten Fak-fak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kotamadya Sorong. Terdiri dari 124 Kecamatan, 48 Kelurahan, dan 1173 Kampung. Namun sekarang Provinsi Papua Barat telah berkembang menjadi 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 (satu) kota.

#### **Ekonomi**

Perekonomian Papua Barat pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan sebesar 26,82 persen dibanding tahun 2009. Nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2010 mencapai Rp 8.685,65 miliar, sedangkan pada tahun 2009 sebesar Rp 6.848,56 miliar. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDRB tahun 2010 naik sebesar 30,87 persen, dari Rp 17.214,14 miliar pada tahun 2009 menjadi sebesar Rp 22.527,36 miliar pada tahun 2010. Hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi di sektor industri pengolahan 149,52 persen. Sementara sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar minus 0,84 persen.

- Sumber utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 adalah sektor industri pengolahan 21,94 persen, sektor pertanian 1,72 persen, dan sektor konstruksi 0,93 persen.
- Sumber utama pertumbuhan ekonomi dari sisi penggunaan adalah komponen ekspor yang menunjang 14,24 persen. Diikuti oleh perubahan stok 6,88 persen dan konsumsi rumah tangga 3,79 persen.
- Secara triwulanan, PDRB Papua Barat triwulan IV/2010 tumbuh 2,25 persen dibandingkan dengan triwulan III/2010 (*q-to-q*). Bila dibandingkan dengan triwulan IV/2009 (*y-on-y*) perekonomian PDRB Papua Barat tumbuh sebesar 30,64 persen.
- Di sisi sektoral, pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor jasa-jasa yang mencapai 12,39 persen dan yang terendah terjadi di sektor industri pengolahan yang tumbuh minus 3,26 persen. Sementara di sisi penggunaan, pertumbuhan tertinggi terjadi di komponen pembentukan modal tetap bruto sebesar 9,15 persen dan yang terendah di ekspor yang tumbuh minus 2,48 persen.
- PDRB per-kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2010 mencapai Rp 29,61 juta, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp 23,14 juta.

### **Geografi**

Papua Barat mempunyai potensi yang luar biasa, baik itu pertanian, pertambangan, hasil hutan maupun pariwisata. Mutiara dan rumput laut dihasilkan di kabupaten Raja Ampat sedangkan satu-satunya industri tradisional tenun ikat yang disebut kain Timor dihasilkan di kabupaten Sorong Selatan. Sirup pala harum dapat diperoleh di kabupaten Fak-Fak serta beragam potensi lainnya. Selain itu wisata alam juga menjadi salah satu andalan Irian Jaya Barat, seperti Taman Nasional Teluk Cenderawasih yang berlokasi di kabupaten Teluk Wondama. Taman Nasional ini membentang dari timur Semenanjung Kwatisore sampai utara Pulau Rumberpon dengan panjang garis pantai 500 km, luas darat mencapai 68.200 ha, luas laut 1.385.300 ha dengan rincian 80.000 ha kawasan terumbu karang dan 12.400 ha lautan.

### **Demografi :**

Pada tahun 1990 jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat tercatat sebanyak 385.509 jiwa, sedangkan pada tahun 2000 tercatat 571.107 jiwa, dan tahun 2007 telah mencapai 722.981 jiwa.

Secara keseluruhan, di Papua terdapat 7 wilayah adat yang mencakup 246 suku. Papua Barat terbagi dalam dua wilayah adat, yaitu III dan IV. Wilayah adat III terdiri dari 19 suku dengan nama suku besarnya adalah Bomberay di Sorong. Wilayah adat IV terdiri dari 52 suku dengannama suku besarnya adalah Domberay di Manokwari.

### **Agama :**

Penduduk Provinsi Papua Barat memeluk agama yang berbeda-beda, namun kerukunan hidup beragama dapat terjaga dengan baik, hal ini terlihat dari tumbuhnya fasilitas peribadatan bagi semua pemeluk agama dan bertambahnya rohaniawan dari masing-masing agama. Data Tahun 2006 menunjukkan bahwa prosentase terbesar pemeluk agama adalah Kristen Protestan (50,70%), kemudian

Islam (41,27%), Kristen Katolik (7,70%), Hindu (0,12%), Budha (0,08%) dan Konghucu (0,01%). Pada Provinsi Papua Barat terdapat Kabupaten yang mendapat julukan Kota Injil yaitu Kabupaten Manokwari dimana pertama kali Injil datang ke Tanah Papua di Pulau Mansinam yang merupakan wilayah Kabupaten Manokwari.

#### **Kemiskinan:**

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua Barat hingga Maret 2010 mencapai 256.250 jiwa atau 34,88 persen dari total jumlah penduduk. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding 2009 sebanyak 256.840 jiwa. Selama periode 2009-2010, jumlah penduduk miskin turun turun 0,23 persen dan persentase penduduk miskin turun 0,83 poin.

Meskipun angka kemiskinan di Papua Barat turun, tetapi indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan. Kondisi ini dapat dimaknai, kemiskinan di Provinsi Papua Barat semakin dalam dan semakin parah. Kenaikan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan terjadi di perkotaan dan pedesaan. Pemerintah Provinsi Papua Barat sebaiknya memprioritaskan program-program pembangunan yang pro penduduk miskin. Pengarusutaman penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin dan mengurangi pengeluaran penduduk miskin dalam hal kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan.

#### **Kesehatan**

Di Papua Barat terdapat 12 rumah sakit yang melayani 743.860 penduduk. Hal ini juga berarti bahwa 1 rumah sakit melayani sekitar 57.220 penduduk. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2009, ketersediaan rumah sakit milik pemerintah mengalami peningkatan dari sedangkan rumah sakit swasta dari tahun 2006 hingga 2009 tidak mengalami perubahan dalam segi kuantitas.

Penyebaran tenaga medis seperti dokter yang tidak memadai di Provinsi Papua Barat, terutama di kabupaten pemekaran menyebabkan pelayanan kesehatan tidak maksimal. Hal itu disebabkan oleh keterjangkauan dalam hal jarak yang ditempuh untuk mendapatkan pelayanan dokter. Terdapat kecenderungan banyaknya ketersediaan dokter tersebar di kabupaten/kota yang telah ramai dengan fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Sebagai contoh adalah Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong memiliki tenaga dokter yang terbanyak, masing-masing memiliki 33, 46, dan 20 orang dokter.

Keterbatasan tenaga medis ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah mengingat kebutuhan akan tenaga dokter sangat diperlukan terutama di kabupaten pemekaran seperti Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Kaimana. Jika diperhatikan dari jumlah penduduk Provinsi Papua Barat tahun 2009 dan jumlah dokter yang tersedia, maka rasio jumlah penduduk terhadap jumlah dokter di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 5.026, dengan kata lain satu dokter rata-rata melayani sekitar 5.026 orang

Sedangkan jika diamati secara parsial, disparitas jumlah dokter antar kabupaten/kota tidak merata. Disparitas terbesar terjadi di Kabupaten Sorong. Di kabupaten ini seorang dokter harus melayani sekitar 11.079 penduduk. Sementara rasio penduduk-dokter yang terkecil berada di Kabupaten Fakfak. Itu pun seorang dokter di Kabupaten Fakfak rata-rata harus melayani setidaknya 2.064 penduduk.

Implikasi lain dari keterbatasan jumlah dokter tersebut adalah masyarakat harus memanfaatkan tenaga medis atau paramedis lainnya sebagai subjek pelaksana penyehatan masyarakat seperti pemanfaatan dukun untuk persalinan.

Penggunaan jasa tenaga dukun semakin meningkat dari 25,39 persen pada tahun 2008 menjadi 27,26 persen pada tahun 2009. Masih tingginya persentase kelahiran yang ditolong oleh dukun di Provinsi Papua Barat menunjukkan bahwa peranan dukun dalam proses kelahiran balita terakhir masih tinggi. Di Kabupaten Raja Ampat, peran dukun dalam penolong kelahiran pertama balita mencapai 78,49 %.

### **Keamanan dan Ketertiban**

Terkait persoalan keamanan, diyakini bahwa pemeliharaan ketertiban masyarakat disertai penegakan hukum yang tegas dan manusiawi diyakini akan mampu menciptakan terbinanya ketentraman masyarakat seperti yg di harapkan. Dalam persoalan keamanan di Papua Barat, pihak Polda dihadapkan pada kesan dan stigma masyarakat Indonesia pada umumnya yang selalu melihat Papua sebagai kawasan yang tidak aman, tidak stabil dan selalu rawan konflik baik sosial atau politik, horisontal maupun vertikal. Imaji ini muncul karena pemberitaan media yang kerap yang selalu memberitakan gejala di Papua tanpa mengerti persoalan budaya dan ethnografi masyarakatnya. Padahal secara umum, keamanan Papua Barat, khususnya, adalah aman. Bahkan secara umum, tingkat kerawanan dan kriminalitas di Papua tidak lebih tinggi dari wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia.

Salah satu stigma dari Papua adalah perang suku. Perang suku merupakan salah satu cara dalam penyelesaian permasalahan diantara suku-suku yang bertikai. Walaupun selalu dipicu oleh permasalahan sepele, perang suku sebenarnya merupakan bentuk dari konflik bersenjata yang sangat "beradab". Perang tidak akan terjadi tanpa adanya "deklarasi" dari suku untuk melakukan perang dan hanya melibatkan suku tersebut saja. Suku-suku lain akan menarik diri dan suku yang tengah berperang tidak akan melibatkan suku lain. Uniknyanya dari perang suku ini adalah adanya batas waktu peperangan yaitu dilaksanakan hanya pada siang hari. Ketika petang menjelang, maka interkasi perang berhenti atau ketika pada hari minggu, perang jeda karena masyarakat pergi ke gereja. Di gereja, Para seteru yang bertemu berinteraksi layaknya tiada perang dan damai. Proses negosiasi biasanya dilaksanakan pada malam hari.

Dalam penyelesaian masalah pelanggaran hukum ketertiban, di Papua dianut tiga pendekatan.

1. Apabila melibatkan antara Papua – Papua, maka pendekatan yang digunakan adalah hukum adat atau hukum hukum positif. Pemilihan antara adat atau positif dilihat dari kondisi sosial, bentuk pelanggaran maupun tuntutan masyarakat yang ada.
2. Apabila melibatkan Papua – non Papua, maka pendekatan hukum yang digunakan adalah hukum positif.
3. Apabila melibatkan non Papua – non Papua, maka pendekatan yang digunakan adalah hukum positif.

### **Permasalahan**

Berdasarkan paparan di atas, secara umum kendala dan permasalahan yang dihadapi di Papua Barat adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur masih terbatas
2. Kualitas Sumber Daya Manusia masih terbatas
3. Indeks pembangunan manusia dan kesehatan yang rendah
4. Hasil produksi pertanian masih rendah
5. Kemiskinan dan Pengangguran belum teratasi
6. Perumahan penduduk masih banyak yang kurang layak huni
7. Sarana dan Prasarana Fisik Pemerintahan masih terbatas.
8. Sarana dan Prasaran Pariwisata masih Terbatas.

## **II. KUNJUNGAN TERKAIT BIDANG TUGAS KOMISI I DPR RI**

### **1. BIDANG PERTAHANAN**

Terkait tugas Komisi I DPR RI di bidang pertahanan, tim kunker Komisi I DPR RI menerima laporan dari Panglima Kodam XVII/Cendrawasih, Komandan Lantamal X dan Pangkosek IV Biak. Untuk bidang pertahanan, wilayah operasi mitra Komisi I DPR RI ini tidak terbatas hanya di Papua Barat, melainkan juga keseluruhan pulau Papua.

Secara keseluruhan, kondisi bidang-bidang pertahanan yang ada masih jauh dari harapan dan dibawah standar kemampuan operasi minimal dan TOP/DSPP baik alutsista, kesejahteraan maupun sarana dan prasarana. Demikian pula kondisi kesiapan berbagai jajaran TNI (AD, AL, dan AU) di wilayah perbatasan mengalami keterbatasan dukungan logistik, amunisi, alutsista yang memadai, serta dukungan kesejahteraan dan fasilitas kesehatan. Kondisi tersebut masih harus dihadapkan pada tantangan kondisi geografis yang meliputi keterbatasan infrastruktur, adat setempat, dan wabah malaria. Sehingga apabila ada kontijensi, maka satuan-satuan TNI yang berada di wilayah Papua atau Papua Barat diprediksi tidak mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.

Berikut adalah laporan dan hasil temuan tim kunker Komisi I DPR RI di bidang pertahanan di Propinsi PAPUA BARAT:

#### **a. Kodam XVII/Cendrawasih**

Tugas Pokok dan Fungsi Kodam XVII/Cendrawasih adalah untuk menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan & gelar kekuatan, selenggarakan pembinaan teritorial dalam rangka mempersiapkan wilayah pertahanan di darat & menjaga keamanan negara, khususnya di wilayah papua & papua barat.

Terkait konteks pembinaan teritorial (Binter), Kodam XVII telah melakukan berbagai upaya yang terarah, terukur dan bertanggung jawab serta selalu siap dalam membantu pemerintah daerah propinsi, baik Papua maupun Papua Barat untuk percepatan pembangunan di daerah melalui otonomi khusus.

Berikut adalah kondisi dan perkembangan terbaru berkaitan dengan keamanan di Papua secara keseluruhan:

- 1) Secara keseluruhan situasi keamanan di Papua berlangsung kondusif dan dinamis. Kondusif berarti segenap perangkat pemerintahan tetap tegak dan berfungsi tanpa intensitas pelibatan aparat keamanan.
- 2) Kondisi Fasilitas perkantoran dan perumahan di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih masih belum memadai.
- 3) Sarana dan prasarana bagi kesiapsiagaan prajurit yang meliputi alat komunikasi, kondisi bekal, alat perkantoran, serta jumlah dan kondisi kendaraan tempur berada pada kondisi yang belum mencukupi. Ketersediaan munisi bekal pokok dan munisi persediaan berada pada kondisi yang kurang.
- 4) Kendala-kendala yang dihadapi Kodam XVII/Cenderawasih dalam pelaksanaan tugas meliputi kendala dalam pembangunan pos-pos



penjagaan di perbatasan, serta keadaan dan kondisi kesejahteraan prajurit TNI khususnya di wilayah perbatasan.

- 5) Kendala kondisi prajurit yang melaksanakan tugas di daerah perbatasan, meliputi:
  - a. Rentan terhadap penyakit malaria, terserang gigitan hewan berbisa, serta kekurangan gizi.
  - b. Transportasi yang terbatas dalam rangka mendukung evakuasi bagi prajurit yang sakit ataupun yang meninggal/gugur.
  - c. Kurangnya sarana air bersih, terutama di daerah rawa.
  - d. Selama beberapa kali penugasan, belum ada tanda jasa (Dharma Nusa) yang turun.

#### **b. Lantamal X**

Secara umum, kondisi kesiapan gelar pangkalan TNI AL (LANTAMAL) di Provinsi Papua berikut berbagai jajaran Pangkalan TNI AL (LANAL) dibawahnya dalam rangka untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan laut di wilayah perbatasan yang bila dihadapkan pada tahapan sasaran penyelenggaraan pertahanan sampai dengan tahun 2024, masih berada pada kondisi yang terbatas, yaitu meliputi 60% dari tahapan sasaran yang diharapkan. Kondisi keterbatasan tersebut masih harus dihadapkan pada wilayah kerja yang sangat luas serta tingginya tingkat potensi ancaman di wilayah tersebut mengingat bahwa wilayah kerja Lantamal X selain merupakan wilayah strategis, juga merupakan wilayah perairan perbatasan RI yang masih rawan akan berbagai potensi kegiatan pelanggaran wilayah, yang meliputi illegal fishing dan berbagai kegiatan illegal trafficking lainnya.

Sampai dengan saat ini, potensi ancaman pelanggaran wilayah perairan RI masih belum menunjukkan indikasi peningkatan potensi ancaman yang bersifat traditional (aktifitas agresi militer oleh negara lain). Namun demikian, munculnya potensi ancaman dan gangguan yang bersifat non-traditional seperti yang tersebut diatas, perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius karena berpotensi menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.

Berikut adalah ragam pelanggaran yang terjadi di perairan Papua dan proses hukumnya:

No.	PROSES	MAKO LANTAMAL X	LANAL SORONG	LANAL BIAK	FASHARKAN MANOKWARI	JMLH
1.	Penyidikan	-	-	-	-	-
2.	Kajari	-	-	-	-	-
3.	Persidangan	-	-	-	-	-
4.	Banding	-	7	-	-	7
5.	Kasasi	-	7	-	-	7
6.	PK	-	-	-	-	-
7.	Proses Lelang	-	-	-	2	2
	JUMLAH	-	14		2	16

Terkait dengan keterbatasan kondisi diatas, dalam hal ketersediaan SDM, profesionalisme di bidang kemaritiman masih sangat terbatas, baik dari segi kualitas, maupun dari segi kuantitas. Kondisi kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan di kalangan masyarakat pesisir menyebabkan rendahnya perhatian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem, serta rendahnya pengetahuan dan perhatian terhadap batas wilayah perairan RI.

Permasalahan yang paling mendasar dalam pelaksanaan pengamanan laut adalah keterbatasan Alutsista yang memadai untuk dapat menjangkai titik terjauh perbatasan perairan RI, dan untuk melaksanakan tindakan tanggap darurat, serta keterbatasan dukungan bahan bakar bagi pelaksanaan kegiatan pengamanan laut. Keterbatasan tersebut, berdampak pada gelar pasukan di pulau-pulau terluar, serta dukungan logistik dan transportasi bagi pergerakan personil di pulau-pulau terluar.

Sarana dan prasarana peringatan dini yang meliputi peningkatan jumlah dan kualitas fasilitas radar, serta peningkatan kemampuan dan jumlah personil intelijen maritim perlu untuk mendapatkan perhatian yang serius dalam rangka untuk menangkal potensi ancaman, serta untuk mendukung efektifitas gelar operasi. Kondisi keterbatasan tersebut ternyata juga masih harus dihadapkan pada kendala terbatasnya dukungan alat komunikasi baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

selain itu, kondisi perumahan lantamal X juga masih memiliki banyak keterbatasan seperti yang ditunjukkan dalam tabel ini:

NO	SATLAK	JML PERS	STATUS RUMAH				
			DINAS	MESS	KONTRAK	PRIBADI	NUMPANG
1	MAKO LANTAMAL X	761	249	276	83	39	114
2	LANAL BIAK	155	103	37	1	12	2
3	LANAL SORONG	137	78	33	-	1	25
4	FASHARKAN MANOKWARI	219	144	42	-	30	3
	JUMLAH	1272	574	388	84	82	144

### c. Kosek IV Hanudnas

Kosekhanudnas IV berada dibawah langsung Pangkohanudnas Jakarta sebagai Komando Utama dan bertempat di Biak Numfor Papua dengan tugas pokok menyelenggarakan Pengendalian Operasi Pertahanan Udara Nasional sesuai dengan letak geografi yaitu di wilayah Indonesia bagian Timur.

Wilayah Tanggung jawab Kosekhanudnas IV :

– **Secara Geografi mencakup :**

- 1) Sebelah barat diatas kepulauan Halmahera, Pulau seram dan sebelah barat Nusa tenggara timur.
- 2) Sebelah Utara Batas teritori lautan Pasifik.
- 3) Sebelah Timur dengan Negara PNG
- 4) Sebelah selatan Batas Teritori dengan Negara Australia.

## 2. Secara Kependudukan :

- 1) 3 Kodam yaitu Kodam IX/Udayana, Kodam XVI/ Patimura dan Kodam XVII/Cendrawasih.
- 2) Komando Armada Wilayah Timur Surabaya.
- 3) Komando Operasi Angkatan Udara II Makasar.
- 4) 5 Pemda Propinsi yaitu Papua, Papua Barat, NTT, Ambon dan Sulawesi Utara.
- 5) 3 Polda yaitu Papua, NTT dan Sulawesi Utara.

Kosekhanudnas IV pada saat ini membawahi satuan/unsur permanen yaitu satuan yang secara langsung baik pembinaan maupun pengoperasian langsung di bawah Kosekhanudnas IV. Satuan/Unsur yang dimaksud adalah Satuan Radar yang mempunyai tugas sebagai pengamatan udara secara elektronik terhadap semua obyek yang melintas di udara dan sebagai GCI (*Ground Controll Interception*) yaitu pengendali pesawat tempur yang terdiri dari:

- **Satuan Radar 241 Buraen.** Satuan ini berada di wilayah Nusa Tenggara Timur Kupang dan Satrad ini digelar pada Tahun 1980. Alutsista yang di gelar adalah radar buatan Prancis Merk Thomson dengan kemampuan jarak pengamatan baik SSR (*Secondary Surveillance Radar*) maupun PSR (*Primary Surveillance Radar*) sejauh 240 Nm. Akan tetapi pada saat ini kemampuan khususnya PSR sudah rata rata 100 Nm pada ketinggian FL 350.
- **Satuan Radar 242 Tanjung Warari.** Satuan ini berada di wilayah Papua Kabupaten Biak Numfor dan Satrad ini digelar relatif baru yaitu pada Tahun 2004. Alutsista yang digelar adalah buatan Prancis Merk Master-T dari **Thalles Raytheon**. Kemampuan sampai saat ini baik PSR maupun SSR dapat menangkap obyek sejauh 240 Nm sesuai dengan *Operational Requirements* Alutsista TNI AU.
- **Satuan Radar 244 Merauke.** Satuan ini berada di wilayah Papua dan Satrad ini digelar pada Tahun ini yaitu 2011. Alutsista yang digelar adalah buatan Prancis Merk Master-T dari **Thalles Raytheon**. Kemampuan sampai saat ini baik PSR maupun SSR dapat menangkap obyek sejauh 240 Nm sesuai dengan *Operational Requirements* Alutsista TNI AU.

Kosekhanudas IV pada saat ini tidak memiliki satuan-satuan yang di BKO yaitu satuan pada saat kontinjensi baru digelar berdasarkan aspek ancaman dan pembinaannya di Kotama Ops masing masing. Satuan-satuan yang dimaksud adalah :

- **Satuan/Unsur tempur Sergap.** Satuan ini merupakan satuan pesawat tempur berkemampuan Strategi dalam menyergap pesawat di udara. Satuan ini tergelar dibawah pembinaan Koopsau I dan II yaitu dari Skadron Udara 1 Supadio, Skadron udara 3 Iswahyudi, Skadron udara 11 Hasanudin dan Skadron udara 12 Pekanbaru.
- **Satuan/ Unsur KRI.** Satuan ini merupakan satuan Kapal Laut berkemampuan Hanud yang mempunyai tugas sebagai Hanud titik dan sebagai *Gap Filler* pembinaannya berada di bawah Komando Armada.
- **Satuan/ Unsur Rudal.** Satuan ini merupakan satuan pertahanan Area dan baru tergelar secara permanen di Kosek II dan III dan pembinaannya berada di bawah Kodam.
- **Satuan/ Unsur Arhanudse.** Satuan ini merupakan satuan pertahanan titik dan tergelar di Kosek I pembinaannya dibawah Kodam.

- **Satuan/Unsur Lanud.** Satuan lanud merupakan pendukung sebagai pangkalan Operasi dalam penggelaran pesawat TS satuan itu antara lain Lanud Eltari Kupang, Lanud Merauke, Lanud Jayapura dan Lanud Manahua Biak. Semua satuan tersebut dibawah pembinaan Koopsau II.

Kosekhanudnas IV mengharapkan adanya tambahan terhadap satuan permanen yang aad, tidak hanya satuan radar yang dapat mengamati seluruh wilayah udara tetapi juga satuan pemukul tempur strategis yang dapat digunakan sebagai tindakan polisional dalam penegakan hukum di udara. Satuan itu antara lain :

- **Satuan Radar.** Sampai saat ini program yang di rencanakan sudah hampir sebagian wilayah udara tercoverage kecuali daerah Sorong yang menjadi *Blank Area* sehingga perlu ada penambahan penggelaran 1 unit radar di wilayah Sorong. Sementara Satuan Radar yang telah diprogramkan dalam perencanaan MEF (*Minimum Esential Force*) satuan itu adalah :
  - 1) Satuan Radar 243 Timika (TA 2012)
  - 2) Satuan Radar 245 Saumlaki (TA 2011)
  - 3) Satuan Radar Morotai ( TA 2012-2014)
  - 4) Satuan Radar Jayapura. ( TA 2012-2014)
  - 5) Satuan Radar Ambon (TA 2020-2024)
- **Satuan TS** (Tempur Sergap). Satuan ini sampai saat ini belum diprogramkan penggelarannya dalam MEF sehingga diharapkan kedepan ada satuan pemukul yang ditempatkan di Biak.
- **Satuan yang di BKO.** Satuan-satuan ini kedepan masih cukup relevan sehingga bila terjadi kontijensi bergerak atas permintaan.

### 3. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Terkait dengan bidang tugas komunikasi dan informasi, Komisi I DPR RI menerima laporan dan masukan dari 3 unsur, yaitu LPP TVRI, LPP RRI dan Komisi Penyiaran Independen Daerah Papua. Berikut adalah laporannya:

#### a. TVRI

TVRI Stasiun Papua adalah Lembaga Penyiaran Publik (LPP), klasifikasi tipe B, daerah operasional TVRI Papua, menjangkau seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat dengan motto “Noken Kita Bersama” karena berorientasi pada budaya dan kearifan lokal sebagai simbol diikat dalam kebersamaan.

“Noken” adalah tas jala dijalin dari kulit kayu sebagai media yang umumnya digunakan oleh oleh masyarakat Papua untuk mengisi bahan hasil bumi, hasil ternak dan lain lain bahkan untuk menggondong bayi, untuk mengisi barang-barang berharga dan sebagai alat pembayaran maskawin yang sah/resmi serta ada yang dipakai untuk hiasan dalam memainkan tarian dan masih banyak lagi. Noken memiliki simbol tersendiri yang menggambarkan jatidiri masyarakat Papua bahkan Noken merupakan simbol kesuburan, kebersamaan, persatuan, perlindungan, kerja dan kepercayaan termasuk di dalamnya tolong-menolong dan kemandirian masyarakat Papua serta merupakan ikon budaya banyak suku bangsa di Papua.

Berikut adalah beberapa persoalan yang dihadapi TVRI Papua:

- Jangkauan siaran atau *coverage area*. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain dan rawan dari persoalan ancaman kedaulatan, keberadaan TVRI di Papua sangat penting. TVRI papua dapat menjadi sumber

informasi utama sekaligus media yang akan menjadi rujukan masyarakat. Namun demikian, pentingnya keberadaan TVRI ini tidak didukung oleh *coverage area*. Ssiaran lokal TVRI Stasiun Papua masih terbatas dan belum menjangkau seluruh wilayah operasional kerja yang meliputi Papua dan Papua Barat. Padahal provinsi ini memiliki wilayah perbatasan dengan negara tetangga dan masih banyak daerah tertinggal serta rawan konflik vertikal (separatisme)

- Tingginya wilayah *blank spot*. Bentuk topografi dan geografi Papua dan Papua Barat menjadi kendala bagi pembangunan pemancar sehingga terdapat banyak *blank spot area* karena tidak adanya menara pemancar TVRI sehingga TVRI Papua baru mampu melayani sebagian kecil penduduk perkotaan saja.
- Minimnya jam siaran. Jam siaran lokal TVRI Papua selama 4 jam pukul 17.00 – 21.00 WIT dan secara rutin siaran dilaksanakan pada setiap hari senin-minggu. (18 Jam siaran Nasional). Siaran TVRI Papua dipancarkan melalui satelit, penyewaan transponder dibiayai oleh Pemda Provinsi Papua.
- Kondisi peralatan pemancar pada TVRI Papua adalah sebagai berikut:
  - a. Pemancar proyek ITTS lokasi Polimak, Tanah Merah (Prov. Papua) tahun 2010 dan pemancar manokwari (Prov. Papua barat) tahun 2010 , kondisi baik.
  - b. Dari keseluruhan peralatan pemancar yang ada yaitu 26 satuan pemancar (20 satuan milik TVRI = 6 off dan 6 satuan milik pemda = 2 off) rata-rata sudah berusia lebih dari 25 tahun dengan kondisi power rata-rata 10 % – 60 % (kecuali proyek ITTS)
- Sebagian besar menara/tower perlu pemeliharaan dan ada 2 lokasi (Merauke dan Sarmi) yang perlu segera direnovasi.
- Sebagian besar bangunan telah mengalami kerusakan dan perlu direnovasi
- Peralatan studia serta sarana prasana lain masih sederhana

#### **b. RRI**

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Manokwari adalah unit pelaksana teknis dibidang pembuatan acara dan penyiaran radio yang berada dibawah kantor pusat LPP RRI dan bertanggung-jawab langsung kepada Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Berikut merupakan keadaan yang kini dihadapi oleh RRI Manokwari dalam melaksanakan tugas-tugasnya:

1. Infrastruktur Studio Penyiaran Yang Belum Representatif
2. Kurangnya dukungan sumber daya manusia, sehingga memerlukan adanya pengembangan SDM untuk meningkatkan keterampilan.
3. Degradasi jumlah PNS dan tenaga operasional siaran yang sangat terbatas disebabkan karena adanya pegawai yang meninggal dan pensiun.
4. Kurangnya dana operasional siaran terbatas dalam menunjang kegiatan operasional siaran. Hal ini dapat menyebabkan kepincangan-kepincangan dalam pelaksanaan tugas, sehingga diharapkan adanya peningkatan dana dari APBN.

### **c. KPID**

Komisi Penyiaran Independen Daerah Papua Barat terbentuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Papua Barat Nomor 61 tahun 2010.

Berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi oleh KPID Papua Barat:

1. Secara kelembagaan:
  - KPID Papua Barat belum diketahui eksistensinya secara maksimal di kalangan masyarakat
  - Hubungan kelembagaan belum berjalan secara maksimal
  - Koordinasi antar instansi teknis belum maksimal
2. Dalam Bidang Perizinan:
  - Sebagian besar (80%) lembaga penyiaran di Papua Barat belum memahami mekanisme perizinan dan regulasi terkait
  - Para pelaku penyiaran mengalami kendala teknis, yaitu akses transportasi yang sukar untuk mengurus proses perizinan
  - Keterbatasan anggaran bagi pelaku penyiaran untuk memproses perizinan
  - Banyaknya keluhan terkait Coverage area oleh para pelaku penyiaran, terkait adanya kekhawatiran dominasi pelaku penyiaran yang memiliki dana besar
  - Sertifikasi perangkat siar yang dinilai sangat memberatkan, khususnya bagi radio komunitas
3. Materi Siaran
  - Sebagian besar pelaku penyiaran tidak memahami P3SPS
  - Masih banyaknya materi siaran maupun iklan yang menyesatkan dan menyinggung rakyat Papua Barat, seperti iklan shampo yang dapat meluruskan rambut atau sabun yang dapat memutihkan kulit
  - Standar dan materi acara masih rendah terkait kurangnya SDM yang kompeten

### **BAB III**

#### **SARAN DAN REKOMENDASI, PENUTUP**

##### **I. SARAN DAN REKOMENDASI TINGKAT LANJUT**

Dari hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi PAPUA BARAT, Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembangunan infrastruktur untuk membuka isolasi
2. Peningkatan indeks dan tunjangan kemahalan bagi anggota TNI/Polri
3. Perekrutan masyarakat ras Melanesia, khususnya Papua, untuk menjadi tokoh atau publik figur yang dapat membuat warga Papua bangga di berbagai sektor
4. Adanya peningkatan SDM TNI yang memiliki visi kelautan dan mampu mengkampanyekan masyarakat berwawasan bahari
5. Tingginya kekayaan sumber daya alam di Papua harus dapat dieksplorasi secara bijak dan mengedepankan perlindungan serta kelestarian alam untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
6. Dalam rangka pembangunan pertahanan negara khususnya wilayah kelautan di lantamal X, maka di wilayah tersebut perlu ditambah fasilitas pangkalan, perumahan prajurit, peningkatan alutsista dan peningkatan anggaran yang memadai
7. Terkait pertahanan udara:
  - a. Percepatan penggelaran Satuan Radar Hanud dan pengadaan Radar Baru di Satuan 241 Buraen.
  - b. Penggelaran Satuan Pemukul TS di Biak.
8. Sebagai media pemersatu, maka TVRI dan RRI perlu:
  - a. dilakukan penambahan stasiun di wilayah-wilayah strategis,
  - b. penambahan peralatan studio (in door maupun out door),
  - c. pengadaan pemancar baru atau mengganti yang lama dan
  - d. merehabilitasi gedung, tower pemancar dan sarana prasarana lainnya

##### **III. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI ke Propinsi PAPUA BARAT dalam Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2010 - 2011. Kami harapkan hasil kunjungan kerja tersebut dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi sidang-sidang Komisi I DPR RI selanjutnya serta Pemerintah dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan di wilayah Indonesia.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

**KETUA TIM,**

**H. HAYONO ISMAN, S.IP**  
**A-450**

